

## Kontribusi Mahasiswa Magang dalam Melakukan Penginputan Laporan Keuangan DPRD Kota Palu guna Mendukung Pemeriksaan BPK

*Contribution Of Intern Students in Inputting Financial Statements of the Palu City DPRD to Support BPK Audits*

<sup>1\*)</sup>Angelika Margaretha Natalia Lie, <sup>2)</sup> Sri Handayani, <sup>3)</sup>Zelda Safikha Bajamal, <sup>4)</sup>Puput Arianti Kaimudin, <sup>5)</sup>Isman Bruaharja, <sup>6)</sup>Asria Wahyuni Ahmad, <sup>7)</sup>Bayu Febrianto

<sup>1,2,3,4)</sup>Hukum/Illmu Hukum, Universitas Tadulako, 94119, Indonesia

\*email korespondensi: [angelikamargarethanatalialie@gmail.com](mailto:angelikamargarethanatalialie@gmail.com)

No hp: +62 815 4331 6043

DOI:

[10.30595/jppm.v10i2.30854](https://doi.org/10.30595/jppm.v10i2.30854)

Histori Artikel:

Diajukan:  
16/05/2026

Diterima:  
07/07/2026

Diterbitkan:  
15/07/2026

### Abstrak

Pengelolaan administrasi keuangan yang tertib merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan dan kelancaran pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DPRD Kota Palu sebagai mitra pengabdian masih menghadapi berbagai kendala administrasi berupa keterlambatan pengumpulan berkas, ketidaksesuaian dokumen pendukung, serta tingginya beban administrasi pada proses penginputan laporan keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mahasiswa melalui kegiatan magang memberikan dukungan administrasi kepada Sekretariat DPRD Kota Palu dalam proses penginputan laporan keuangan. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui koordinasi dengan staf pengelola keuangan serta pelibatan mahasiswa dalam penginputan laporan keuangan, verifikasi dokumen pendukung, penyesuaian data, dan pengarsipan berkas administrasi keuangan untuk membantu mempersiapkan dokumen administrasi agar lebih lengkap, tertata, dan siap mendukung pemeriksaan oleh BPK. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa magang mampu meningkatkan ketelitian, sistematika administrasi, dan efektivitas proses penginputan data keuangan melalui pemeriksaan dokumen, penyesuaian data, serta pengarsipan berkas secara terstruktur. Selain itu, mahasiswa turut membantu mengatasi kendala administrasi berupa ketidaksesuaian dokumen dan keterlambatan pengumpulan berkas. Kontribusi tersebut meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga data menjadi lebih akurat, mudah diakses, dan mendukung kelancaran pemeriksaan oleh BPK. Kegiatan magang juga mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, tertib, efektif, dan akuntabel.

**Kata kunci:** Penginputan Laporan Keuangan; Administrasi Keuangan Daerah; DPRD; BPK



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

### **Abstract**

*Orderly management of financial administration is one of the important needs in supporting the preparation of financial statements and smooth audits by the Financial Services Authority (BPK). The Palu City DPRD as a service partner still faces various administrative obstacles in the form of delays in the collection of files, inconsistencies in supporting documents, and high administrative burdens in the process of submitting financial statements. To overcome these problems, students through internship activities provide administrative support to the Palu City DPRD Secretariat in the process of inputting financial statements. Service activities are carried out through coordination with financial management staff and student involvement in financial report input, verification of supporting documents, data adjustment, and archiving of financial administration files to help prepare administrative documents to be more complete, organized, and ready to support audits by BPK. The results of the activity showed that the involvement of interns was able to improve the accuracy, administrative systematics, and effectiveness of the financial data input process through document examination, data adjustment, and structured file archiving. In addition, students also help overcome administrative obstacles in the form of document inconsistencies and delays in file collection. This contribution improves the quality of financial statements so that data becomes more accurate, easily accessible, and supports smooth audits by the BPK. Internship activities also support transparent, orderly, effective, and accountable regional financial management.*

**Keywords:** *Financial Statement Input; Regional Financial Administration; DPRD; BPK*

### **Pendahuluan**

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari *good governance* (pemerintahan yang baik) yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Nurrizkiana et al., 2017). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah agar dilakukan secara tertib efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pengelolaan kas dan pelaksanaan anggaran negara/daerah, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Yang

mengatur pemeriksaan keuangan oleh BPK untuk menilai kewajaran laporan dan potensi kerugian negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, penginputan laporan keuangan sangat menentukan kualitas laporan pemerintahan daerah, namun masih terdapat kendala seperti kesalahan administrasi, keterlambatan *input* data, dan ketidaksesuaian dokumen sehingga diperlukan proses yang sistematis sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (Tumija et al., 2023). Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, pengawasan dan audit terhadap pengelolaan keuangan negara

melibatkan beberapa lembaga, baik pengawas internal maupun eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal kementerian/lembaga, dan Inspektorat Daerah. Namun setelah putusan tersebut, kewenangan konstitusional dalam melakukan pemeriksaan serta menetapkan kerugian keuangan negara ditegaskan berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sekretariat DPRD Kota Palu sebagai mitra pengabdian masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan administrasi keuangan, antara lain keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban, ketidaksesuaian antara dokumen pendukung dengan data pengeluaran, serta tingginya beban administrasi dalam proses penginputan laporan keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan proses verifikasi dan penyesuaian data harus dilakukan secara berulang sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi kurang efisien dan berpotensi menghambat kesiapan dokumen dalam pemeriksaan oleh BPK. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem administrasi yang tertib, aksesibilitas informasi, dan efektivitas pengawasan. Aurelia dan Tarmizi, (2023) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan, aksesibilitas informasi, dan efektivitas pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga sistem pelaporan yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Rahmadany (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan *good governance* di Sekretariat DPRD masih menghadapi kendala administratif, termasuk dinamika regulasi yang mempengaruhi proses pelaporan. Berdasarkan hal tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui pendampingan administrasi keuangan yang melibatkan mahasiswa magang untuk membantu meningkatkan ketertiban administrasi, ketepatan penginputan laporan keuangan, serta penataan dokumen pendukung agar lebih lengkap, sistematis, dan siap mendukung pemeriksaan oleh BPK.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara jelas terkait kontribusi mahasiswa magang dalam proses penginputan laporan keuangan di DPRD Kota Palu guna mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Metode tersebut dipilih karena mampu mendeskripsikan berbagai aktivitas dan permasalahan yang ditemukan selama proses penginputan laporan keuangan berlangsung (Nurrisa & Hermina, 2025). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan mendeskripsikan proses administrasi keuangan, kendala yang dihadapi dalam proses penginputan laporan keuangan, serta keterlibatan mahasiswa magang dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Sekretariat DPRD Kota Palu (Rusandi & Rusli, 2021).

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui pengalaman langsung penulis selama melaksanakan kegiatan magang

dan penginputan laporan keuangan, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen keuangan, dan berbagai referensi terkait pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan di bagian pengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu pada tanggal 06-24 April 2026. Dalam kegiatan proses penginputan keuangan ini melibatkan 7 mahasiswa magang secara langsung untuk kegiatan pendampingan administrasi keuangan pada proses penyusunan dan penginputan laporan keuangan. Sasaran kegiatan adalah pengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sebagai persiapan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK. pelaksanaan kegiatan dimulai dengan koordinasi bersama staf pengelola keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan administrasi yang dihadapi. Selanjutnya, para staf Sekretariat DPRD Kota Palu bersama dengan mahasiswa melaksanakan pendampingan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi dan penyesuaian data dengan dokumen pendukung yang ada, penginputan laporan keuangan, serta pengarsipan dokumen secara sistematis.

Keberhasilan kegiatan ini diukur dari beberapa indikator, yaitu meningkatnya kelengkapan dokumen administrasi sehingga berkurangnya ketidaksesuaian antara data pengeluaran dan dokumen pendukung, serta tersusun arsip dokumen administrasi secara sistematis yang memudahkan pencarian dokumen dalam mendukung persiapan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK.

Data kegiatan diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan pengalaman langsung selama pelaksanaan magang, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan, kendala yang dihadapi, serta kontribusi mahasiswa dalam mendukung pengelolaan administrasi keuangan di Sekretariat DPRD Kota Palu.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil pengabdian terdiri dari hasil secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Jika ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu memberikan kesempatan kepada mahasiswa magang untuk terlibat langsung dalam proses administrasi keuangan daerah. DPRD sendiri memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (Ayu & Nurjaman, 2022). Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Sekretariat DPRD berperan dalam memberikan pelayanan administrasi, termasuk pada bidang pengelolaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari persiapan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Rasyid et al., 2022).

Pengelolaan administrasi keuangan di DPRD Kota Palu dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

(Auditya et al., 2021). Proses administrasi keuangan meliputi pencatatan transaksi, pemeriksaan dokumen, penginputan data keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta pengarsipan dokumen pendukung terkait kegiatan dan penggunaan anggaran daerah (Evada, 2021). Dalam pelaksanaannya, ketelitian sangat diperlukan karena setiap data yang dimasukkan akan menjadi bagian dari laporan keuangan yang nantinya akan diperiksa oleh BPK sebagai auditor negara.

Selama pelaksanaan program magang, mahasiswa ditempatkan pada beberapa divisi di Sekretariat DPRD Kota Palu sesuai dengan kebutuhan unit kerja. Setiap divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda sehingga aktivitas mahasiswa disesuaikan dengan bidang penempatan masing-masing. Namun, pada tahap penyusunan laporan keuangan sebagai persiapan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mahasiswa dilibatkan secara khusus dalam kegiatan pendampingan administrasi keuangan. Bentuk pendampingan tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencocokan data pengeluaran dengan dokumen pendukung, penyesuaian data apabila ditemukan ketidaksesuaian, penginputan laporan keuangan, serta pengarsipan dokumen secara sistematis (Vidyasari & Suryono, 2021). Keterlibatan mahasiswa dalam proses tersebut memberikan kontribusi positif bagi mitra, yang ditunjukkan melalui peningkatan kelengkapan dokumen administrasi, berkurangnya ketidaksesuaian antara data pengeluaran dengan dokumen pendukung sebagai hasil proses verifikasi, serta penataan arsip yang lebih sistematis sehingga penelusuran dokumen dapat dilakukan dengan lebih mudah dan

persiapan pemeriksaan oleh BPK dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Proses penginputan laporan keuangan dilaksanakan secara bertahap diawali dengan melakukan pengumpulan dokumen administrasi, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Kwitansi Pembayaran, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Daftar Perjalanan Dinas, Laporan Kegiatan Reses, Kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil), serta dokumen pendukung lainnya. Kegiatan reses sendiri dilaksanakan oleh anggota DPRD setiap tiga bulan sekali sebagai sarana penyerapan aspirasi masyarakat di masing-masing daerah pemilihan. Selain itu, terdapat kegiatan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) yang juga dilakukan 3 kali dalam satu tahun guna melihat secara langsung kondisi masyarakat serta perkembangan pembangunan di wilayah daerah pemilihan. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara terstruktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala selama proses penginputan laporan keuangan. Beberapa dokumen kegiatan belum lengkap, termasuk nota pengeluaran yang masih ditulis tangan sehingga memerlukan dokumen pendukung lain yang dapat membuktikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu, terjadi keterlambatan penyerahan berkas dari beberapa anggota DPRD, khususnya pada kegiatan perjalanan dinas darat, kegiatan reses, dan kunjungan daerah pemilihan (kundapil). Ditemukan pula ketidaksesuaian antara data pengeluaran dan dokumen



pendukung sehingga diperlukan pengecekan serta penyesuaian data secara berkala. tersebut disebabkan oleh keterlambatan penyampaian dokumen pertanggungjawaban, belum optimalnya koordinasi antara pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan, serta kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum proses penginputan. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap transaksi keuangan harus didukung oleh bukti yang lengkap, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Oleh sebab itu, kelengkapan dokumen dan ketelitian administrasi menjadi hal penting dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

Sebagai upaya mengatasi berbagai kendala administrasi keuangan yang ditemukan selama kegiatan magang, pegawai Sekretariat DPRD Kota Palu bersama mahasiswa melaksanakan pendampingan administrasi melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencocokan data pengeluaran dengan dokumen pendukung, penyesuaian data apabila ditemukan ketidaksesuaian, serta penyusunan arsip dokumen berdasarkan jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan. Mahasiswa juga membantu melakukan verifikasi dokumen sebelum data diinput ke dalam laporan keuangan sehingga proses penyusunan laporan menjadi lebih sistematis dan memudahkan penelusuran dokumen ketika dibutuhkan pada saat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara

pegawai dan mahasiswa mampu meningkatkan ketertiban administrasi, mempercepat proses penyelesaian dokumen, serta mengurangi kesalahan administrasi yang sebelumnya sering terjadi akibat keterlambatan penyerahan dokumen maupun ketidaksesuaian data pendukung. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andansari et al. (2022) yang menyatakan bahwa penataan dokumen administrasi dan pengelolaan arsip secara sistematis mampu meningkatkan efektivitas administrasi serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Hikmawan et al. (2022) bahwa pengelolaan arsip yang tertata mempermudah proses temu kembali dokumen dan meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi.

Selama pelaksanaan kegiatan pengabdian, belum dilakukan penyusunan maupun penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) baru secara formal di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu. SOP yang dibahas dalam jurnal ini merupakan rekomendasi hasil evaluasi kegiatan berdasarkan berbagai kendala yang ditemukan selama proses pendampingan administrasi keuangan. Rekomendasi tersebut diajukan karena keterlambatan penyerahan dokumen dari masing-masing bagian menyebabkan proses verifikasi dan penginputan laporan keuangan membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, penyusunan SOP mengenai batas waktu penyerahan dokumen, mekanisme pemeriksaan kelengkapan berkas, serta alur verifikasi administrasi diharapkan dapat menjadi acuan kerja yang seragam bagi seluruh unit sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat berlangsung lebih efektif,

tertib, dan akuntabel. Penelitian mengenai implementasi prosedur kerja menunjukkan bahwa SOP yang jelas mampu meningkatkan konsistensi pelaksanaan pekerjaan, meminimalkan kesalahan administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan organisasi (Andansari et al., 2022).

Selain itu, selama kegiatan magang belum dilakukan implementasi sistem administrasi keuangan berbasis digital secara menyeluruh karena mahasiswa hanya memanfaatkan sistem administrasi yang telah tersedia di instansi. Oleh sebab itu, digitalisasi administrasi keuangan yang dibahas pada penelitian ini merupakan rekomendasi pengembangan untuk mendukung pengelolaan administrasi pada masa mendatang, bukan hasil implementasi kegiatan pengabdian. Penguatan digitalisasi melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), pengelolaan arsip elektronik, maupun sistem administrasi keuangan terintegrasi dipandang mampu mempercepat proses pencatatan, meningkatkan akurasi data, memudahkan proses pencarian dokumen, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Tumija et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi SIPD mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah melalui integrasi proses perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Sejalan dengan itu, Rahmadany (2024) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, memperkuat transparansi, serta mendukung reformasi birokrasi berbasis teknologi. Penelitian Maulani et

al. (2024) juga menegaskan bahwa implementasi SIPD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi. Selain itu, Rahman dan Kristanto (2025) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-finance* berkontribusi terhadap peningkatan akurasi data, percepatan proses administrasi, dan kualitas laporan keuangan melalui digitalisasi proses pengelolaan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pengabdian, rekomendasi lain yang dapat diberikan adalah peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan atau bimbingan teknis mengenai pengelolaan administrasi keuangan, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, serta penguatan koordinasi antar bagian dalam penyusunan dokumen pertanggungjawaban. Evaluasi berkala terhadap proses administrasi juga perlu dilakukan sebagai bagian dari pengawasan internal sehingga setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sebelum memasuki tahapan pemeriksaan oleh BPK. Penguatan kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem administrasi keuangan berbasis digital serta meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah (Rahmadany, 2024; Tumija et al., 2023). Dengan demikian, rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Sekretariat DPRD Kota Palu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan pada periode berikutnya. Sebelum data dinyatakan siap untuk digunakan dalam penyusunan

laporan keuangan, seluruh dokumen administrasi terlebih dahulu melalui proses validasi secara berlapis. Tahapan validasi diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, seperti Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kuitansi, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), surat tugas, daftar hadir kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya dilakukan proses pencocokan (*cross-check*) antara nominal transaksi yang tercantum pada dokumen pendukung dengan data yang akan diinput ke dalam laporan keuangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dokumen dikembalikan kepada bagian terkait untuk dilakukan klarifikasi dan perbaikan sebelum dilakukan penginputan. Setelah seluruh data dinyatakan sesuai, pegawai pengelola keuangan melakukan verifikasi akhir sebagai bentuk pengendalian internal sehingga data yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan telah memenuhi prinsip akurat, lengkap, dapat ditelusuri, dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses validasi dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas informasi keuangan dan mendukung kelancaran pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi dokumen administrasi yang dilakukan secara sistematis mampu meningkatkan kredibilitas data, menjaga keandalan informasi, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan dokumen organisasi (Moilanen et al., 2022). Selain itu, penerapan sistem pengendalian administrasi yang baik juga berpengaruh

terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan (Andansari et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan, pegawai pengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa magang memberikan kontribusi positif terhadap percepatan penyelesaian administrasi keuangan, terutama pada tahap pemeriksaan dokumen, penginputan data, dan pengarsipan berkas. Menurut mitra, pembagian pekerjaan antara pegawai dan mahasiswa membantu mengurangi beban administrasi sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Selain itu, penyusunan arsip secara lebih sistematis mempermudah proses pencarian dokumen ketika dilakukan pemeriksaan internal maupun pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi instansi mitra dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Yuesti et al. (2022) yang menjelaskan bahwa pengelolaan informasi keuangan yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terbukti mendukung efektivitas administrasi dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Irawati & Frinaldi, 2022).





Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Laporan Keuangan hari pertama

Gambar 1 (satu) menunjukkan kegiatan hari pertama pelaksanaan pendampingan administrasi keuangan yang diawali dengan koordinasi bersama pegawai pengelola keuangan Sekretariat DPRD Kota Palu. Pada tahap ini mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai mekanisme penyusunan laporan keuangan, sistem pengarsipan dokumen, serta prosedur pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sebelum dilakukan proses penginputan. Selain itu dilakukan pembagian tugas sesuai jenis dokumen yang akan diverifikasi sehingga proses pekerjaan dapat berjalan secara lebih efektif. Kegiatan koordinasi tersebut menjadi tahapan awal yang penting dalam memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai prosedur dan mendukung ketepatan penyusunan laporan keuangan (Yuesti et al., 2022).



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Penginputan Laporan Keuangan hari kedua

Selanjutnya, Gambar 2 (dua) memperlihatkan pelaksanaan kegiatan pada hari kedua, yaitu mahasiswa mulai terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen, pencocokan data transaksi dengan dokumen pendukung, penginputan laporan keuangan, serta penyusunan arsip administrasi sesuai klasifikasi dokumen. Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membantu percepatan penyelesaian administrasi keuangan sehingga dokumen yang diperlukan untuk persiapan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat disusun secara lebih tertib, sistematis, dan mudah ditelusuri kembali apabila diperlukan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Hikmawan et al. (2022) yang menyatakan bahwa pengelolaan arsip secara sistematis mampu meningkatkan efektivitas administrasi, mempercepat proses temu kembali dokumen, serta mendukung efisiensi pelayanan organisasi. Temuan tersebut juga didukung oleh Andansari et al. (2022) yang menjelaskan bahwa ketelitian dalam proses pencatatan dan pengarsipan dokumen berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

### **Simpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui program magang mahasiswa di Sekretariat DPRD Kota Palu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung penyelesaian administrasi keuangan daerah sebagai persiapan menghadapi pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan program ini mampu menjawab kebutuhan mitra, khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia untuk

menyelesaikan proses verifikasi dan penginputan laporan keuangan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi serta harus diselesaikan dalam waktu yang terbatas.

Dari perspektif manfaat bagi mitra, program ini berhasil membantu penyelesaian verifikasi dan penginputan lebih dari 150 dokumen keuangan, melakukan pengarsipan dokumen kegiatan DPRD secara sistematis berdasarkan jenis dan periode, serta mengidentifikasi sekaligus memperbaiki berbagai ketidaksesuaian data yang berpotensi menghambat kelancaran proses pemeriksaan BPK. Sekretariat DPRD Kota Palu menilai bahwa keterlibatan mahasiswa memberikan dampak positif terhadap efektivitas, ketertiban, dan kelancaran administrasi keuangan sehingga dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan dapat dipersiapkan secara lebih optimal.

Selama pelaksanaan magang, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam menangani berbagai proses administrasi keuangan, mulai dari pengecekan dokumen, penyesuaian data dengan bukti pendukung, hingga membantu proses *input* data ke dalam sistem. Pengalaman tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya ketelitian, kedisiplinan, serta tanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan di lingkungan pemerintahan, terutama dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Selain memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan mahasiswa, kegiatan magang ini juga membantu meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Palu.

Keterlibatan mahasiswa dalam proses administrasi turut memperlancar penyusunan laporan keuangan yang digunakan untuk pemeriksaan BPK. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

### Referensi

- Andansari, E., Mursidi, M., & Jihadi, M. (2022). The Influence of Recording, Inventorying, Reporting, and Application on the Quality of Financial Report (Case of SIMAK-BMN). *Business Innovation Management and Entrepreneurship Journal*, 1(2), 99–106.  
<https://doi.org/10.22219/bimantar.a.v1i02.23307>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *JURNAL FAIRNESS*, 3(1), 21–42.  
<https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Aurelia, N., & Tarmizi, R. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemda Tanggamus). *Jurnal EMT KITA*, 7(2), 563–571.  
<https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1236>

- Ayu, N., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD): Pembelajaran dari Kota Malang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59–69.  
<https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>
- Evada Dewata, H. J. dan M. E. A. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Sistem Akuntanasi Pemerintah Daerah. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5747284>
- Fitriana, R. D., & Trisnaningsih, S. (2025). The Role of Bank Vouching on Financial Statement Integrity: A Case Study of MBKM Internship Independent. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(4), 22–27.  
<https://doi.org/10.61132/ijema.v2i4.802>
- Hikmawan, T., Santoso, B., & Imaniyati, N. (2022). Readiness Analysis of Archives Instruments 3 in 1 Model in the Effectiveness of Dynamic Archives Management. *Record and Library Journal*, 8(2), 207–215.  
<https://doi.org/10.20473/rlj.V8I2.2022.207-215>
- Irawati, A., & Frinaldi, A. (2022). Analysis of the Implementation of the Regional Financial Management Information System (SIPKD) in Regional Financial Management in the City of Padang Panjang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 12(2), 411–428.  
<https://doi.org/10.26858/jiap.v12i2.38035>
- Maulani, A., Anshori, M. N., & Andriani, N. (2024). Inovasi Teknologi dalam Pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai Alat untuk Mendukung Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan (JIIP)*, 7(2).  
<https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451>
- Moilanen, T., Sivonen, M., Hipp, K., Kallio, H., Papinaho, O., Stolt, M., Turjamaa, R., Häggman-Laitila, A., & Kangasniemi, M. (2022). Developing a Feasible and Credible Method for Analyzing Healthcare Documents as Written Data. *Global Qualitative Nursing Research*, 9.  
<https://doi.org/10.1177/23333936221108706>
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1).  
<https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Rahman, M. S., & Kristanto, B. (2025). Implementasi E-Finance sebagai Inovasi Digitalisasi Administrasi Keuangan di

- Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i1.6965>
- Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195–209. <https://doi.org/10.33701/jiaped.v16i2.4809>
- Rasyid, A., Albarbassy, M. M., Satispi, E., & Samudra, A. A. (2022). The Performance Of Legislative Secretariat Services: Perspective Of The New Public Service. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 145–159. <https://doi.org/10.25077/jakp.7.2.145-159.2022>
- Rusandi & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile Government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195–209. <https://doi.org/10.33701/jiaped.v16i2.4809>
- Tumija, Hendra, A., Sinurat, M., & Ali, H. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>
- Yuesti, A., Adnyana, I. M. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2022). Management Information Systems and the Quality of Financial Statements in Local Government. *Journal of Public Affairs*, 22(3), e2462. <https://doi.org/10.1002/pa.2462>